

NALAR NEGARA DAN AKTUALISASINYA

(Versi Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah)*

Oleh Syaifullah**

Kurang lebih sebulan yang lalu, saya dihubungi oleh kolega saya, mas Budi, Ketua Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kiranya saya bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam kajian yang bertema Muhammadiyah dan Politik, saya di minta sebagai narasumber. Saya merespon dengan apresiatif dan sulit untuk mengatakan tidak, karena itu saya jawab: insya Allah saya bisa. Tapi tolong proposalnya dikirim ke Bengkulu. Seminggu kemudian saya menerima fax proposal tersebut. Sejak itu saya serius mempersiapkan makalah sebagaimana yang diharapkan terutama tidak hanya untuk seminar tetapi juga untuk sebuah kepentingan penulisan buku sebagaimana yang menjadi tujuan LPI PP Muhammadiyah. Makalah ini saya mulai dengan memotret pemikiran politik (nalar negara) sejak Kyai Dahlan dan generasi selanjutnya. Kemudian, mengeksplor perilaku politik Muhammadiyah sejak Kyai Dahlan hingga generasi sekarang, dengan menangkap pesan sentral yang saya sebut sebagai karakteristik politik Muhammadiyah. Kenapa harus di mulai dari Kyai Dahlan ? adalah naif mendiskripsikan pemikiran apalagi gerakan (perilaku) Muhammadiyah tanpa mendiskripsikan pemikiran atau nalar dan laku negara (baca: politik) dari pendirinya. Sehingga dapat ditangkap benang merahnya untuk bisa dijadikan *blueprint* generasi berikutnya. Mengakhiri makalah ini, saya menukikan pada kasus politik lokal atau pemilu legislatif di tingkat daerah dan pemilihan kepala daerah. Tentu saja yang terakhir ini tidak dalam kontek kesaksian atau testimoni tapi lebih mengedepankan ketegangan budaya atau gaya hidup Muhammadiyah dengan realitas politik lokal.

Nalar Negara dalam Muhammadiyah

Sepanjang usia Muhammadiyah yang hampir satu abad, penulis hanya menemukan pemikiran politik Muhammadiyah yang cukup "komprehensif" yaitu "Konsepsi Negara Islam" tahun 1955 yang disampaikan oleh Abdul Kahar Muzakir,

* Disampaikan dalam Kajian Tematik III Muhammadiyah di Tengah Pusaran Politik Nasional (kasus pemilu dan pilkada) oleh Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Magelang tanggal 9 Agustus 2008.

**Syaifullah, mantan anggota KPU Provinsi Bengkulu, mantan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY, mantan Ketua Pimpinan Daerah IPM Yogyakarta, mantan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah BPK – AMM (Badan Pendidikan Kader Angkatan Muda Muhammadiyah) provinsi DIY dan Bengkulu, mantan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu Pembina Bidang Politik Hukum dan HAM, mantan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu, mantan staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IKIP (Universitas Ahmad Dahlan) dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kini staf Pengajar di Universitas Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu Pembina Bidang Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, serta Majelis Pemberdayaan Masyarakat.

alumnus Universitas *Al-Azhar* dan *Dar al-Ulum*, Kairo, Mesir, yang juga salah seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memperoleh mandat dari Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 tahun 1953 di Purwokerto, dimana pada Mukhtamar tersebut atas aspirasi dan desakan muktamirin, agar Muhammadiyah mempunyai konsepsi negara Islam dan oleh pimpinan sidang, Prof. HM Farid Makruf, diputuskan agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah menunjuk tim yang ditugaskan menyusun pemikiran politik. Perdebatan prasaran konsepsi negara Islam dalam Sidang Tanwir 1955 membuahkan hasil agar Abdul Kahar Muzakir menyempurnakan prasaran tersebut dan disampaikan kepada seluruh , anggota Tanwir yang tersebar di Indonesia untuk memperoleh input pemikiran politik anggota Tanwir-sayang, *follow-up* dari Sidang Tanwir tidak ditemukan data-datanya, termasuk Mukhtamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang tahun 1956. Memang ada indikasi awal bahwa konsepsi negara Islam tersebut disempurnakan, terutama pada salah satu poin dalam Khitah Perjuangan Muhammadiyah (1956-1959) yang secara eksplisit menyebut masyarakat negara Islam, seperti kutipan berikut:

Mengatur hidup dan penghidupan antara rumah tangga dengan tetangganya sejak mulai kelahiran, perkawinan dan kematian, sehingga akhirnya dapat mewujudkan masyarakat kampung atau desa Islam, masyarakat kota Islam dan akhirnya masyarakat negara Islam¹

Indikasi ini, setidaknya mempertajam tesis bahwa pemikiran politik Muhammadiyah hanya dan mulai mencuat ketika posisi Muhammadiyah secara vulgar menempatkan dirinya sebagai anggota istimewa Masyumi (1945-1959), yang diistilahkan almarhum Hamka sebagai kuku dan daging, ketika menyebut hubungan Muhammadiyah dan Masyumi.

Alasan tesis tersebut, *pertama*, pemikiran konsep negara Islam dan khitah masyarakat negara Islam justru hadir pada saat hubungan Muhammadiyah dan Masyumi mencapai tahap kemesraan tingkat tinggi, setelah Masyumi ditinggal oleh anggotanya dari sayap "tradisionalis" NU pada tahun 1952, menyusul PSII tahun 1947.² *Kedua*, sebelum dan sesudah Masyumi membubarkan diri tahun 1960, hingga hari ini (2008) tidak ditemukan pemikiran politik Muhammadiyah secara komprehensif dan mendetail. *Ketiga*, temuan-temuan dari kelanjutan poin kedua, adalah pada aspek teologi politiknya, yaitu prinsip-prinsip fundamental dari strategi perjuangan Muhammadiyah dan strategi perjuangan Muhammadiyah pun sifatnya panduan umum yang masih memerlukan elaborasi secara konseptual, termasuk di dalamnya khitah terbaru yaitu khitah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dihasilkan dalam sidang Tanwir di Bali, 2002.

Dari temuan tersebut ada benarnya tesis yang selama ini berkembang bahwa pemikiran politik Muhammadiyah tidak berkembang ? Ada tiga fakta yang mendasari asumsi tersebut, *pertama*, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, melekat pada dirinya sebagai gerakan amal, bukan gerakan pemikiran. *Kedua*, gerakan yang memilih secara sadar jalur organisasi kemasyarakatan, bukan jalur partai politik. *Ketiga*, gerakan tajdid nonpolitik. Gerakan tajdid "politik" di dunia Islam belum menjadi arus utama, sungguhpun telah dirintis oleh Jamaludddin Al-Afghani lewat Pan Islamisme. Gagalnya konggres Khilafah Islamiyah di Makkah tahun 1925 dan 1926 di Mesir yang ingin mengembalikan pusat kekuasaan dunia Islam-setelah lembaga kesultanan dan kekhalifahan dunia Islam yang berpusat di Turki ditiadakan oleh Kemal At-Taturk tahun 1922 dan 1923-menjadi bukti reformasi politik atau negara Islam belum menjadi arus utama. Bahwa paruh abad ke-20 negara-negara Islam mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan adalah fakta lain, misalnya Mesir, Libya, Turki, Pakistan, Yaman, Indonesia, dan Malaysia. Sungguh pun konsep pemikiran politiknya belum berkembang.

Menjadi naif menelaah pemikiran politik Muhammadiyah tanpa mengcover pemikiran politik pendirinya. Mengabaikan pemikiran politiknya, akan kehilangan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bercorak *tajdid* -purifikasi dan dinamisasi. Karena itu, pemikiran politik Muhammadiyah meniscayakan dimulai dari pendirinya, KH Ahmad Dahlan.

Nalar Negara versi Kyai Dahlan

Ada banyak kesulitan dalam menelusuri gagasan politik Ahmad Dahlan. *Pertama*, karena ia dikenal sebagai tokoh yang cenderung pragmatis, memiliki keprihatinan kuat membebaskan umat Islam melalui pembaruan langsung dan tidak melalui ide-ide sistematis. *Kedua*, sebaliknya, tokoh amal ini tidak banyak mewarisi gagasan pembaruan secara tertulis. Hal ini bisa dipahami sebagai antisipasi kecenderungan pemikiran dan sikap sebagian besar komunitas Muslim yang mengultuskan elit agama. Dan Ahmad Dahlan menolak posisi ini, karena sumber keterbelakangan dalam pandangan Ahmad Dahlan adalah perilaku demikian. Ahmad Dahlan menawarkan pemikiran dan sikap *ijtihad* dan *ittiba*, bukan taklid. Seperti penilaian Nurcholish Madjid³, Dahlan kendati tidak berlatar belakang pendidikan Barat, namun membuka pintu lebar-lebar gerbong rasionalisme melalui ajaran Islam itu sendiri. Tokoh ini membuka *ijtihad* lebar-lebar serta membuang jauh-jauh taklid dari kehidupan umat. Dahlan bahkan sebagai penyambung matarantai intelektualisme Islam di Indonesia. *Ketiga*, corak pembaharuan Dahlan (di samping purifikasi atau pemurnian ajaran teologi dan ritual juga dinamisasi ajaran kemanusiaan dan kebangsaan termasuk aspek politik), terutama yang disebut terakhir, tidak berkembang, karena tuntutan sosiologis lebih mengedepankan pada pemecahan masalah sosial secara konkret dan perangkat keras untuk mensosialisasi gagasan-gagasannya seperti

perguruan tinggi dan media massa belum ada. Hal ini tidak dijumpai oleh Muhammad Abduh pembaru Islam dari Mesir, yang gagasan-gagasan pembaruannya didukung oleh institusi perguruan tinggi Al-Azhar dan Dar al-Ulum serta majalah Al-Urwatul Wustqa.

Sejauh referensi yang ada, gagasan politik Ahmad Dahlan secara spesifik hampir dipastikan tidak ada, namun semangat dan rintisan gagasan ke arah politik, beliau telah memulainya. Keterlibatannya sebagai advisor atau penasehat pada organisasi politik, misalnya, Budi Utomo dan Syarikat Islam mengantarnya untuk terus berinteraksi di kancah politik. Dalam Konggres Budi Utomo 1917 di rumah Ahmad Dahlan, pengurus Budi Utomo mengajukan pasal yang pro-Islam dalam anggaran dasar dengan redaksi "**mempertahankan agama Islam tanpa menyalahi kebebasan beragama**". Dr. Kadjiman, mantan ketua dan anggota volksraad-belakangan, menjelang Indonesia merdeka, ia terpilih sebagai ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)-mengkritik bagian itu dengan memberikan usul yang berbunyi "**hak yang sama dalam semua agama tanpa pilih kasih**". Konggres menyetujuinya dengan redaksi yang netral "**Budi Utomo mempertahankan pendirian netral dalam agama**".⁴

Terlepas usulan awal itu tidak disetujui, namun semangat dari usulan dan keputusannya sama, yaitu semangat pluralitas menjadi dasar dari Budi Utomo. Patut diduga bahwa penekanan pada kosakata Islam yaitu: **mempertahankan agama Islam** mengindikasikan pengaruh dari sosialisasi gagasan Islam Ahmad Dahlan pada pengurus Budi Utomo dan telah berlangsung cukup lama (8 tahun), sejak Ahmad Dahlan sebagai anggota dan advisor Budi Utomo tahun 1909 yang dilakukan sehabis rapat pengurus, dengan pendekatan teks dan konteks, mengawinkan ayat dengan realitas yang hidup, sementara itu respon dari kalangan cendekiawan Budi Utomo amat menggembirakan, oleh karena Islam yang ditampilkan Ahmad Dahlan sebagai Islam yang bercorak rasional yang berbeda pada semangat zaman pada umumnya.

Setahun kemudian, pada tahun 1918, dalam rapat tahunan (algemeene vergadering) muncul dualisme gagasan, yaitu Muhammadiyah sebagai organisasi politik dan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan. Gagasan pertama diwakili oleh Agus Salim - salah seorang penandatangan Piagam Jakarta tahun 1945 dan gagasan kedua diwakili oleh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Munculnya dualisme ini dimungkinkan karena agenda rapat tahunan tersebut membicarakan UU dasar atau anggaran dasar / anggaran rumah tangga (AD / ART) persyarikatan Muhammadiyah.

Perbincangan mengenai pentingnya Politik, ditambah dengan gaya retorika dan agitasi Agus Salim sebagai tokoh politik dari Syarikat Islam (SI) membuat peserta rapat tahunan terpikat padanya dan menyetujui pendapatannya. Hal ini disaksikan dan diakui oleh seorang kader Ahmad Dahlan yang ikut dalam rapat

tersebut, yaitu Hadjid, yang pada kemudian hari menjadi anggota Konstituante dari fraksi Masyumi. Hadjid menulis :

Pada waktu itu, saya bersesuaian pendapat dengan H. Agus Salim, kemudian pada waktu itu pembicaraan dua pendapat (Ahmad Dahlan dan Agus Salim tersebut, suara H. Agus Salim sangat menarik dan saya pun kelihatan keras dan menyetujui pendapat H. Agus Salim....⁵

Namun sosok politikus Agus Salim bisa didinginkan oleh argumentasi Ahmad Dahlan yang mengandung logika agama, meskipun Ahmad Dahlan terkesan sedikit emosi pada awalnya. Hadjid melanjutkan, sampai akhir pembicaraan itu (Agus Salim) dihentikan oleh Kyai Ahmad Dahlan dengan mengetok palu pimpinan ambil berdiri, sehingga sidang tenang kembali.⁶

Ahmad Dahlan bersama Cokroaminoto dari Syarikat Islam memprakarsai Kongres Islam pertama se-Indonesia di Cirebon Tahun 1922. Dalam kongres itu, Ahmad Dahlan menyampaikan prasarana "Persatuan Dunia Islam".⁷ Ahmad Dahlan melihat adanya tanda-tanda kebangkitan dunia Islam dan momentum ini harus terus dibangun dengan memberi arah yang tepat sesuai dengan kesejatan ajaran Islam. Ahmad Dahlan mengatakan:

Masa sekarang ini (1922, pen) boleh dikatakan masa Islam bangun. Persyarikatan berasaskan Islam itulah tanda dan kenyataannya, misalnya persyarikatan Syarikat Islam, Muhammadiyah dan lain-lainnya. Orang Islam sudah memulai mulai bangun kepada agamanya. Kita orang lebih (-lebih, pen) pula persyarikatan Islam, harus berikhtiar supaya sesudah bangun itu mendapatkan jalan yang betul (siratbal mustaqim). Jalan yang betul adalah agama Islam sejati.⁸

Kesejatan Islam, oleh Ahmad Dahlan digambarkan dengan empat pilar yaitu: pertama, rukun Islam (syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji). Kedua, rukun iman atau teologi Islam. Ketiga, etika, dan ke empat, relasi kemanusiaan meliputi amar ma'ruf (humanisasi), nahi munkar (liberasi) dan mu'awanah atau tolong menolong (advokasi).⁹ Persatuan dunia Islam menjadi obsesi Ahmad Dahlan, dan harus diwujudkan dalam satu institusi. Lebih dari itu, misinya tidak lain adalah menebarkan kedamaian dan keselamatan dunia. Ahmad Dahlan mengatakan:

Persatuan Islam itulah yang harus kita tuju ... semua orang Islam harus menjadi badan satu yang berguna. Tandanya hidupnya itu bergerak dan tidak diam saja. Gerak orang Islam harus menuju satu yakni selamatnya dunia.¹⁰

Misi kedamaian dan keselamatan dunia menjadi tanggung jawab anak manusia, karena itu harus dibicarakan bersama-sama. Sungguh pun para pelakunya harus melintasi sekat-sekat batas agama. Ahmad Dahlan mengatakan:

semua keperluan bersama-sama harus dibicarakan bersama-sama. ...perhubungan antara orang Islam dengan siapa juga tiada dilarang untuk keperluan hidup segala manusia.¹¹

Beberapa saat menjelang wafat (1923) Ahmad Dahlan menghadiri Konggres Muhammadiyah ke-12. Karena sakit, Ahmad Dahlan hadir part time, tidak penuh. Dalam orasinya, Ahmad Dahlan menyampaikan prinsip-prinsip kesatuan hidup. Di antaranya kerja sama kemanusiaan. Hal ini dalam pandangan Ahmad Dahlan bahwa setiap orang mempunyai potensi kebenaran, termasuk semua orang yang berbeda kebangsaan dan agama. Ahmad Dahlan mengatakan:

Kerja sama adalah prinsip kesatuan hidup,... kebaikan dan kecerdasan adalah kesediaan memahami pikiran yang baik dan bijaksana. Orang yang kuat adalah orang yang bersedia mengakui kebenaran dan kebaikan orang lain¹²

Ajakan Ahmad Dahlan kepada pemimpin dunia untuk duduk bersama mencari kebenaran tanpa melihat sisi kebangsaannya. Ahmad Dahlan mengatakan:

marilah para pemimpin untuk segera berkumpul membicarakan kebenaran tanpa memandang dan memilih bangsa.¹³

Keperihatinan Ahmad Dahlan pada tatanan dunia Islam melahirkan konsep penguatan dunia Islam yang tercermin pada dua gagasan politik Ahmad Dahlan: *Pertama*, persatuan dunia Islam sebagaimana telah dibahas. *Kedua*, kepemimpinan dunia Islam. Dalam persepsi Ahmad Dahlan kepemimpinan bangsa-bangsa masih menampilkan fenomena kekacauan, karena kesatuan hati para pemimpinnya belum terfokus pada kesatuan kemanusiaan. Hal ini disebabkan karena tiga hal: *pertama*, para pemimpin tidak mempunyai kesamaan visi. Hal ini sebagai akibat dari sempitnya wawasan Ke-Islaman dan peradaban dunia kontemporer. *Kedua*, para pemimpin pada umumnya belum melakukan kerja kongkrit secara bersama-sama. Baru melakukan retorika dan mengumbar statemen, namun pembuktiannya dalam wujud nyata belum teruji. *Ketiga*, sebagian besar pemimpin mempunyai motivasi, vested interest, kepentingan individu atau golongannya. Belum sampai pada level kepentingan bersama, yaitu kepentingan dunia Islam. 17 Ahmad Dahlan memberi solusi terhadap masalah ini dengan menawarkan perlunya dibangun persatuan hati para pemimpin. Ahmad Dahlan menulis: “Saya sangat berharap supaya para pemimpin itu berusaha mempersatukan hati manusia.”¹⁴

Kesatuan hati para pemimpin bisa diwujudkan manakalah para pemimpin duduk bersama membahas agenda kebenaran lewat logika mantik. Ahmad Dahlan menulis: marilah para pemimpin untuk segera berkumpul membicarakan kebenaran tanpa memandang dan memilih bangsa¹⁵ Adapun jalan mencapai kebenaran dengan akal yang sehat dan akal ini oleh Ahmad Dahlan harus diberdayakan lewat ilmu mantik, karena kebenarannya sesuai dengan realitas yang ada setelah kebenaran dicapai lewat musyawarah, Ahmad Dahlan berpendapat harus ditindaklanjuti dengan

aksi kongkrit ialah amal saleh. Pada tataran ini, menurut Ahmad Dahlan harus proporsional, sesuai dengan sasaran perubahan. Ahmad Dahlan mengatakan: "segala pengetahuan tidak akan bermanfaat apabila tidak dikerjakan sejalan dengan keadaan."¹⁶

Gagasan kepemimpinan dunia Islam versi Ahmad Dahlan terlihat pada beberapa prinsip: mengkaji kebenaran secara bersama-sama dengan memaksimalkan kerja akal sehat, kemudian produk kebenaran itu harus dibuktikan dalam kerja kemanusiaan secara nyata. Konsekuensi logis dari prinsip-prinsip tersebut adalah perlunya perangkat keras dan lunak dalam format institusi modern yang mampu mengantarkan gagasan-gagasan dasar dan pengembangannya dari kebenaran tersebut. Muhammadiyah adalah warisan institusi tersebut yang dibelakangnya mengandung alur gagasan kebenaran.¹⁷

Nalar Negara Paska Kyai Dahlan

Dimana posisi konsep negara Islam yang digagas Muhammadiyah? Posisi konsep negara Islam terkuak cukup mengagetkan setelah ditemukan data-prasaran HM Fakih Usman-anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 1950 sampai 1968 dan menjadi anggota DPR sekaligus anggota Konstituante hasil Pemilu 1955, dari fraksi Masyumi. Sementara itu, posisi HM Fakih Usman di kepengurusan Pimpinan Pusat Masyumi sebagai Wakil Ketua III (1956) dan Wakil Ketua II dalam kepengurusan 1959¹⁸ dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tanggal 24-26 Agustus 1957 di Yogyakarta, menegaskan:

Walaupun Muhammadiyah sudah lama mempunyai maksud untuk menciptakan suatu konsepsi konstitusi Islam, tapi ternyata bahwa maksud itu belum pernah terlaksana dan sampai hari ini belum ada bayangan-bayangan suatu konsepsi yang dimaksud. Malah lebih daripada itu, Muhammadiyah secara resmi belum pernah memutuskan negara bagaimana yang dituju: negara Islam? Negara berdasar Islam? Atau bagaimana? Keputusan Mukhtamar ke-32 di Purwokerto yang maksudnya menuju memperjuangkan kenyataan-kenyataan ajaran Islam bukan hanya nama atau sebutan Islam, belum pernah memperoleh penafsiran yang diperlukan. Bahkan terhadap keputusan itu masih terdapat perbedaan tafsir.¹⁹

Sengaja dikutip lengkap dan agak panjang karena data ini amat informatif, terkait dengan posisi akhir dari prasaran Abdul Kahar Muzakir tentang konsepsi negara Islam disampaikan dua tahun sebelumnya, bahkan secara institusi, Muhammadiyah dinyatakan belum pernah membuat keputusan final, karena masih debatable-tentang konsepsi negara Islam. Hal yang positif adalah Muhammadiyah telah terpanggil dan memulai merancang konsepsi negara Islam, untuk seterusnya, wacana dan kebijakan tentang hal ini diberi ruang pada partai Masyumi, yang di dalamnya, Muhammadiyah sebagai anggota istimewanya.

Terpilihnya Abdul Kahar Muzakir sebagai anggota Konstituante dari fraksi Masyumi -menyusul hasil Pemilu pertama 1955- memberikan dugaan kuat, konsepsi negara Islam yang ia rancang, menjadi salah satu referensi dalam panitia konstitusi yang diberi nama Biro Konstitusi dan berpusat di Bandung. Salah satu anggotanya adalah Abdul Kahar Muzakir.²⁰ Dan hasilnya seperti dikatakan Fakih Usman:

Kalau kita periksa isi konsepsi konstitusi Masyumi itu ialah: negara berdasar Islam; kedaulatan negara pada hukum Ilahi; ajaran-ajaran Islam dirumuskan dengan konkrit dalam beberapa bentuk; nama negara Republik Indonesia atau Republik Islam Indonesia; bentuk pemerintahan demokrasi parlementer; sistem dua kamar: Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Daerah; tidak tegas berupa federasi; tidak mutlak bersifat presidential; kesempatan mengatur corak masyarakat sendiri bagi daerahdaerah (otonom, pen).²¹

Dengan kata lain, konsep negara Islam yang digagas oleh Muhammadiyah, tidak pernah sampai pada level kebijakan final. Kemungkinannya disebabkan dua hal. Pertama, bahwa konsep negara Islam, termasuk wilayah ijtihadi, yang memungkinkan perdebatannya menghasilkan keragaman konsep. Kedua, saluran perdebatan telah diwadahi dalam *politic sphere*-ruang politik dalam partai Masyumi. Dan Muhammadiyah adalah anggota istimewa Masyumi.

Sementara itu, dokumen kedua berkaitan salah satu poin Khittah Muhammadiyah yang dihasilkan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang berbunyi: "masyarakat negara Islam", menyusul penghadapan anak kalimat sebelumnya: "masyarakat kota Islam" dapat dijelaskan bahwa menghadapi kota dan negara, semata-mata untuk penguatan kalimat yang pesan intinya adalah tercapainya tujuan Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tidak dapat diingkari bahwa sejak Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi (1945-1959), watak pemikiran dan penilaian politik Muhammadiyah mengalami eskalasi dan konsekuensi kosa kata politiknya memasuki wilayah-wilayah kultural, sebagai spirit sekaligus bias dari wilayah struktural kekuasaan.

Karakteristik Perilaku Politik Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah

Sejak berdirinya (1912), Muhammadiyah bukan partai politik, meskipun pendirinya, Ahmad Dahlan (1868-1923), mengenal dari dekat tokoh-tokoh politik Indonesia, seperti dr. Wahidin Sudirohusodo, pendiri Budi Utomo (Ahmad Dahlan pernah menjadi anggota dan penasihat Budi Utomo); H. Samanhudi, H.O.S. Cokroaminoto, dan H. Agus Salim, ketiganya pendiri dan pemuka Syarikat Islam (SI) (Ahmad Dahlan pernah menjadi anggota dan penasihat SI).²² Ketika H.O.S. Cokroaminoto mengadakan Kongres Islam di Cirebon pada 1922, Muhammadiyah ikut memfasilitasi penyelenggaraannya. Bahkan, dalam kongres tersebut, Ahmad

Dahlan menyampaikan prasaran tentang Pembaruan Pemikiran Islam dan Konsep Pendidikan Islam.²³

Mas Mansur, tokoh puncak Muhammadiyah (1937-43), juga pernah menjadi anggota dan penasihat SI pada 1915, selepas dari studi keislamannya di Timur Tengah. Pada 1925, Mas Mansur, sebagai tokoh Muhammadiyah sekaligus sebagai tokoh SI, bersama Cokroaminoto, sebagai tokoh puncak SI, menjadi delegasi resmi Indonesia yang menghadiri Kongres Dunia Islam tentang Khilafah Islam di Makkah. Namun, setahun kemudian, pada 1926, SI mengeluarkan disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Dan, Muhammadiyah terkena disiplin partai ini, termasuk Mas Mansur.²⁴

Ketika Partai Syarikat Islam melakukan politik hijrah atau *noncooperation* dengan pemerintah Hindia-Belanda, Muhammadiyah menyadari suatu keharusan adanya politik tidak hijrah atau *cooperation*. Oleh karena ini, lewat Mas Mansur dan Wiwoho, Muhammadiyah mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) pada 1938, meskipun sebelumnya Mas Mansur menemui pemimpin Partai SI agar disiplin partai yang dikenakan pada Muhammadiyah bisa dicabut. Namun, harapan Muhammadiyah tidak terwujud. Jika terwujud, keadaannya akan lain: Muhammadiyah akan memprioritaskan saluran politiknya pada SI.²⁵

Setahun sebelumnya, pada September 1937, telah berdiri lembaga permusyawaratan Islam Indonesia bernama, Majelis A'la Islam Indonesia (MAI) yang diprakarsai tokoh Islam “empat serangkai”: Mas Mansur (Muhammadiyah), Wiwoho Wondoamiseno (SI), Ahmad Dahlan, dan Abdul Wahab (NU). Pelaksanaan lembaga ini diserahkan kepada tokoh “empat serangkai” tersebut. Di lembaga, ini bertemu berbagai organisasi Islam, yang tercermin saat organisasi ini berdiri, yaitu Muhammadiyah, SI, Persatuan Islam, AI-Irsyad (Surabaya), Hidayatul Islamiyah (Banyuwangi), dan Khairiyah (Surabaya).²⁶

Data sejarah di atas menunjukkan peran dan kontribusi aktif Muhammadiyah dalam perjuangan politik dan ini merupakan bagian dari perjuangan Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-citanya. Muhammadiyah menyalurkan perjuangan politik pada partai politik Islam atau berjiwa Islam, tanpa harus menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik. Perjuangan politik ini dilakukan dengan melibatkan seluruh kekuatan umat Islam dengan satu tujuan, yaitu kemenangan Islam. Dengan kata lain, perjuangan politik bagi Muhammadiyah didasarkan pada dua prinsip. *Pertama* Muhammadiyah memerlukan saluran aspirasi politik dan ini dilakukan di luar organisasi Muhammadiyah. *Kedua*, penyaluran aspirasi politik melalui partai politik Islam harus dilakukan dengan tujuan kemenangan Islam dan umatnya secara keseluruhan. Karena itu, upaya untuk melibatkan dan memberdayakan seluruh kekuatan umat Islam merupakan suatu keniscayaan.

Dua prinsip inilah yang dipegang teguh Muhammadiyah ketika bersama tokoh-tokoh Islam lainnya memelopori berdirinya Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 7-8 November 1945, di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Saat pembentukan Partai Masyumi ini, ada pengakuan bahwa Muhammadiyah memerlukan saluran aspirasi dan perjuangan politik, juga ada ikrar bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam bagi seluruh organisasi umat Islam Indonesia. Meskipun demikian, pada 1947 SI keluar dari Masyumi, dan pada 1952 Nahdlatul Ulama (NU) mengikutinya.²⁷

Perilaku politik Muhammadiyah ini mempunyai wujud pada akar sejarah Muhammadiyah. *Pertama*, pada periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (1945) dan *kedua*, pada periode paro kedua tahun 1960-an, *ketiga* pada periode reformasi. Untuk **periode pertama**, perilaku ini tercermin dalam beberapa data sejarah, yaitu: pada 1922, SI yang diwakili H.O.S. Cokroaminoto dan Muhammadiyah yang diwakili KH. Ahmad Dahlan membangun kekuatan umat Islam melalui penyelenggaraan kongres Islam di Cirebon yang diikuti oleh seluruh potensi umat Islam Indonesia; pada 1925, Muhammadiyah yang diwakili K.H. Mas Mansur ikut membidani lahirnya Lembaga Tinggi Hukum Islam Indonesia yang bernama Majelis Islam A'la Far'i Hindi Syarqiyah (MIAHS) di Surabaya pada 1926, dua utusan Indonesia, yaitu K.H. Mas Mansur (wakil dari Muhammadiyah) dan H.O.S. Cokroaminoto (wakil dari SI) menghadiri kongres khilafah Islam di Hijaz, Arab Saudi, sebuah kongres untuk membangun kepemimpinan dunia Islam; pada 1937, Majelis A'la Islam Indonesia (MAI), yang diprakarsai dan dipimpin oleh empat serangkai yaitu: K.H. Mas Mansur (wakil dari Muhammadiyah), Wiwoho Wondoamiseno (wakil SI, yang kemudian berubah PSII), KH. Ahmad Dahlan, dan KH. Abdul Wahab (wakil NU), berdiri. Jabatan ketua dipegang oleh Wiwoho Wondoamiseno, bendahara dipegang K.H. Mas Mansur, dan anggotanya adalah KH. Ahmad Dahlan dan KH. Abdul Wahab.

Dalam MAI ini, seluruh potensi Islam tertampung dan tersalurkan. Pada awalnya majlis ini tidak memiliki kecenderungan politis, tetapi dalam perkembangannya kemudian memasuki arena politik Lembaga ini sempat mengadakan kongres setiap tahun. Pada zaman Jepang, tepatnya pada 1943, MAI berubah nama menjadi Masyumi dan nama ini diabadikan oleh pemimpin-pemimpin Islam Indonesia pada 7-8 November 1945 dengan mendirikan Partai Islam Masyumi. Setahun setelah berdirinya MAI, berdiri Partai Islam Indonesia (PII) di Surakarta, yang diprakarsai Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Islam lainnya. PII lahir pada satu dasa warsa setelah orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang Islam lainnya terkena peraturan disiplin partai dari SI sebagai hasil kongres SI di Pekalongan pada 1927, yang isinya melarang anggota-anggotanya merangkap organisasi dan harus memilih salah satu di antara keduanya. Ini membuat orang-orang Muhammadiyah tetap berada dalam Muhammadiyah dan keluar dari SI, termasuk K.H. Mas Mansur.

Pada 1930 pemimpin-pemimpin Islam yang terkena disiplin partai SI, di antaranya K.H. Mas Mansur, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, dan Wali Alfatah, menyarankan agar SI mencabut kebijakan disiplin partai; membatasi diri ruang geraknya hanya pada aspek politik, sedangkan aspek sosial ekonomi, dan pendidikan diserahkan kepada organisasi yang memang sejak awal dimaksudkan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut; dan melepaskan asas politik hijrahnya, serta memakainya hanya sebagai strategi perjuangan saja. Saran-saran tersebut oleh SI ditolak, dan delapan tahun kemudian, tepatnya pada 1938, berdiri Partai Islam Indonesia (PII), walaupun sebelumnya Muhammadiyah menyampaikan hasil keputusan sidang tentang pandangan politik Muhammadiyah yang bertitik tolak pada persatuan, kekuatan, dan kemenangan dunia Islam, serta meminta SI mencabut kebijakan disiplin partai. Sekali lagi permintaan ini ditolak. Dari latar belakang ini, ditambah kondisi SI yang sudah mulai mundur, yaitu setelah pemimpinnya, H.O.S. Cokroaminoto, meninggal dunia pada 1934, dan pada 1936 H. Agus Salim keluar dari SI dan mendirikan Partai Penyyadar, maka pemimpin-pemimpin Muhammadiyah bersama pemimpin Islam lainnya mendirikan PII setelah bermusyawarah di rumah Dr. Satiman, di Surakarta, pada 4 Desember 1938, dengan susunan pengurus: Wiwoho Purbohadidjojo sebagai ketua, Dr. Sukiman Wirjosandjojo sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Kasmat sebagai sekretaris I, Wali Alfatah sebagai sekretaris II, Dr. Sukardi sebagai bendahara I, dan H. Abdul Hamid sebagai bendahara II. Sedangkan anggotanya terdiri dari: K.H. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusuma, H. Abdul Kahar Muzakkir, H.M. Farid Ma'ruf, dan H. Rasjidi, BA. Delapan dari 11 pengurus PII tersebut adalah wakil Muhammadiyah (73%). Yang bukan adalah Wiwoho Purbohadidjojo, Wali Alfatah, dan Dr. Sukardi.

Pada **periode kedua**, yaitu paro kedua 1960-an (1966-70), corak modernisme perilaku politik Muhammadiyah tercermin dalam tiga peristiwa yang dialami Muhammadiyah. *Pertama*, pengakuan wajah ganda; Muhammadiyah oleh pemerintah Orde Lama dan Orde Baru, yaitu Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, dan sekaligus berfungsi sebagai organisasi massa politik (ormaspol), sehingga Muhammadiyah banyak menempatkan orang-orangnya di DPR dan di MPR Gotong Royong. Pengakuan ormaspol terjadi pada akhir Pemerintahan Orde Lama, pada 5 Januari 1966, dan dikukuhkan dengan tiga surat pada awal pemerintahan Orde Baru, yaitu surat Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial Politik (Adam Malik) tertanggal 27 April 1966 No. 19/WPM/SP/1966; surat Menteri Dalam Negeri (Basuki Rachmat) tertanggal 24 Juni 1966 No. 22/2/32; dan surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 Agustus 1966 No. 22/2/47. Baik surat Wakil Perdana Menteri Adam Malik maupun surat Menteri Dalam Negeri Basuki Rachmat menegaskan pelaksanaan Muhammadiyah sebagai ormaspol supaya dilayani oleh jajaran pemerintah, termasuk gubernur, untuk memperlakukan hak hidup Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana organisasi kemasyarakatan yang lain. Dan, juga memperlakukan Muhammadiyah sebagai organisasi politik sebagaimana organisasi-organisasi politik yang lain.

Kedua, peristiwa lahirnya Parmusi dengan SK Presiden No. 70 tertanggal 20 Februari 1968 yang dibidani Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Islam yang lain. Aktivitas Muhammadiyah tersebut memperlihatkan bahwa persyarikatan ini membidani lahirnya partai politik Islam bagi umat Islam yang belum berpartai. Pembidanan ini sebagai wujud amanat sidang tanwir 1966 di Bandung dan sidang tanwir 1967 di Yogyakarta.

Ketiga, peristiwa sidang tanwir 1969 di Ponorogo, Jawa Timur, yang memutuskan kebijakan strategi atau khittah perjuangan Muhammadiyah, yang di kalangan Muhammadiyah lebih populer dengan istilah khittah Ponorogo. Khittah Ponorogo ini menegaskan bahwa cita-cita perjuangan Muhammadiyah hanya bisa diwujudkan melalui dakwah Islam dengan dua saluran secara serentak, yaitu saluran politik, alatnya adalah organisasi politik atau partai politik, dan saluran masyarakat, alatnya adalah organisasi nonpolitik atau organisasi kornasyarakat. Meskipun ada kesadaran bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang memilih dan menempatkan diri pada bentuk organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tetap membentuk organisasi politik atau partai politik di luar Muhammadiyah yang menyalurkan aspirasi politik Muhammadiyah bersama dengan kekuatan umat Islam lainnya.

Khittah Ponorogo (1969) – yang menjadi cermin corak modernisme politik Muhammadiyah pada awal Orde Baru, dalam prakteknya kemudian berakhir setelah adanya kebijakan politik Muhammadiyah dalam muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di Ujungpandang.

Saat membidani kelahiran Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada awal Orde Baru (20 Februari 1968), dua prinsip di atas tetap dipegang teguh dan dijadikan panduan bagi Muhammadiyah Sejak Masyumi bubar pada 1960 sampai sebelum berdirinya Parmusi, Muhammadiyah secara formal belum mempunyai saluran aspirasi politik pada partai politik Islam. Maka dari itu, pada awal Orde Baru, lewat prakarsa Mulyadi Djojomartono (anggota PP Muhammadiyah yang pernah menjadi menteri sosial dalam Kabinet Juanda pada 1957) Muhammadiyah menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia (PII) yang pernah didirikan Mas Mansur pada 1938. Namun, upaya ini dihentikan demi menjaga keutuhan sikap sesama keluarga mantan anggota Masyumi.²⁸ Menurut Lukman Harun dan Rusjdi Hamka, setelah menemui pihak-pihak yang mempunyai rencana yang sama, termasuk Mohammad Natsir di kediamannya, rencana untuk mendirikan PII ditunda demi solidaritas Islam, sambil mengikuti perkembangan.²⁹ Dalam pertemuan itu, Mohammad Natsir ikut mendukung rehabilitasi Masyumi.

Sementara itu, Hamka, dalam acara tasyakuran di Mesjid Al-Azhar Jakarta untuk menyambut pembebasan tokoh-tokoh Islam dari tahanan, secara tegas mengatakan bahwa rehabilitasi Masyumi merupakan kehendak umat Islam, termasuk Muhammadiyah.³⁰ Meskipun demikian, usaha rehabilitasi partai tersebut gagal, sebagaimana upaya Mohammad Hatta untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam.³¹ Akhirnya, melalui SK Presiden No. 70, pemerintah hanya merestui Parmusi, dengan ketua Jarnawi Hadikusuma. dan sekretaris Lukman Harun (keduanya anggota PP Muhammadiyah).³²

Seminggu setelah Parmusi berdiri, Muhammadiyah membuat pernyataan resmi, yang antara lain menegaskan tentang prinsip keutuhan dan kemenangan perjuangan umat Islam dan negara, serta arah perjuangan Parmusi. Pernyataan selengkapnya sebagai berikut:

[Hendaknya Parmusi mengambil bagian dalam membina kekompakan dan persatuan Nasional Indonesia, khususnya intern umat Islam, sehingga dapat menambah besar dan teguhnya potensi umat Islam Indonesia di bidang politik demi suksesnya perjuangan umat Islam Indonesia dan pembangunan negara dan bangsa Indonesia di segala bidang; hendaknya Parmusi memperlihatkan politik umat Islam yang dilandasi dengan jiwa dan roh Islam yang murni, mencapai negara dan masyarakat yang adil dan makmur yang diridai Allah SWT³³

Seminggu setelah mengeluarkan pernyataan resmi yang merupakan prinsip dasar Muhammadiyah untuk mencapai kemenangan Islam dan umatnya tersebut, Muhammadiyah mengeluarkan pedoman resmi untuk pegangan para pemimpinnya sesudah Parmusi berdiri. Pedoman itu diawali dengan penegasan bahwa berdirinya Parmusi adalah sesuai dengan amanat sidang Majelis Tanwir tahun 1966 di Bandung dan tahun 1967 di Yogyakarta agar PP Muhammadiyah memprakarsai pembentukan wadah politik bagi umat Islam yang belum berpartai, namun dinyatakan pula bahwa berdirinya Parmusi tetap merupakan “proyek bersama” serta mendapat pengertian yang baik dari mantan Pimpinan Pusat (PP) Masyumi.³⁴ Dalam penegasan ini, tercermin prinsip Muhammadiyah yang lain, yaitu bahwa institusi politik di luar Muhammadiyah yang menjadi saluran aspirasi dan perjuangan politik Muhammadiyah merupakan suatu keharusan. Selama delapan tahun, sejak Masyumi bubar pada 1960, Muhammadiyah belum mempunyai saluran politik. Oleh karena itu, dalam sidang Majelis Tanwir 1966 di Bandung, dua tahun sebelum Parmusi berdiri, Muhammadiyah mengamanatkan kepada PP-nya agar memprakarsai berdirinya partai politik Islam. Amanat ini diulangi lagi pada sidang Majelis Tanwir 1967 di Yogyakarta.

Kemudian PP Muhammadiyah menyerukan kepada pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan (wilayah, daerah, dan cabang) untuk segera mengambil prakarsa dalam pembentukan partai tersebut bersama ormas-ormas

pendukung lainnya dan untuk menyalurkan tenaga-tenaga Muhammadiyah yang berbakat dan berhasrat berjuang di bidang politik.³⁵

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pedoman aktivitas Muhammadiyah dalam percaturan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia selalu ditegakkan. Prinsip-prinsip dasar ini mengandung makna ganda, yaitu sebagai saluran aspirasi dan perjuangan politik Muhammadiyah, sekaligus untuk kemenangan Islam dan umatnya secara keseluruhan.

Hal serupa, prinsip-prinsip yang dipegang Muhammadiyah dalam melahirkan Partai Amanat Nasional, walaupun secara tidak langsung.

Periode ketiga (reformasi). Ketika ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA wafat tanggal 28 Juni 1994, Amien Rais tampil sebagai tokoh puncak Muhammadiyah. Sejak kepemimpinan Muhammadiyah dipegang Amien Rais tarikan politik dalam Muhammadiyah kembali menguat. Dalam banyak kesempatan, disamping banyak mengkritik kebijakan-kebijakan politik Soeharto, Amien Rais juga senantiasa menyuarakan kembali perlunya suksesi kepemimpinan Nasional. Kabarnya Soeharto marah besar sehingga beliau berupaya agar “musuh”nya itu tak terpilih dalam Mukthamar Muhammadiyah ke 43 tahun 1995 di Banda Aceh, tapi upayanya gagal, dan Amien terpilih dengan meraih suara hampir seratus persen.

Sebagai ketua PP Muhammadiyah, Amien tak henti-hentinya mengkritik Soeharto sehingga gerakan reformasi politik tahun 1998, alumnus Universitas Chicago, AS, ini dianggap sebagai motor utamanya, dan sejumlah mahasiswa menobatkannya sebagai “Bapak Reformasi”

Kepeloporan Amien menggerakkan reformasi hingga Soeharto lengser dari singgasananya, 21 Mei 1998 bukan tanpa resiko. Sejumlah tokoh reformasi lainnya mendorong Amien Rais mendirikan partai politik untuk menjadi “kendaraan politik” baginya untuk tampil ke kursi kepresidenan, menuntaskan gerakan reformasi.

Kuatnya dorongan pada Amien itu berdampak langsung pada Muhammadiyah sehingga Tanwir 1998 di Semarang antara lain memberikan izin kepada Amien Rais untuk mendirikan partai politik baru, maka berdirilah Partai Amanat Nasional (PAN), 23 Agustus 1998.

Kelahiran PAN kendati tidak keluar langsung dari rahim organisasi Muhammadiyah tetapi secara moral dan kesejarahan terkait dengan *ijtihad* politik hasil Tanwir Muhammadiyah bulan juli tahun 1998 di Semarang. Pada waktu menjelang dan selama Sidang Tanwir di Semarang itu, terdapat dua isu yang merupakan kenyataan sosiologis yang dihadapi kalangan Muhammadiyah.

Pertama, M. Amien Rais yang waktu itu Ketua PP Muhammadiyah telah muncul menjadi tokoh utama gerakan reformasi yang memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998. Amien Rais bahkan oleh kalangan mahasiswa dinobatkan sebagai Bapak Reformasi Indonesia, setelah sejak tahun 1993 isu suksesi dan berbagai kritik serta langkah politiknya menimbulkan perubahan peta politik Orde Baru sampai akhirnya meledak menjadi gerakan reformasi.

Kedua, sebagai tindak-lanjut ingin mendorong kereta reformasi ke arah yang makin konkret dalam memasuki era baru paska kejatuhan Orde Baru yang memerlukan pemerintahan baru yang memperoleh legitimasi rakyat, sejumlah tokoh Muhammadiyah dari wilayah-wilayah se-Indonesia menghendaki Ketua PP Muhammadiyah itu mendirikan partai politik baru dan kemudian memproyeksikan tokoh ini untuk menjadi salah satu calon Presiden Indonesia ke-4. Dukungan yang luas dari elit dan warga Muhammadiyah itu mencerminkan tanggungjawab orang-orang Muhammadiyah terhadap gerakan reformasi.

Dalam Komisi-C di Sidang Tanwir itu keinginan para elit Muhammadiyah itu disepakati secara bulat, namun Dr. Amien Rais sendiri merasa terlalu berat menerima mandat yang sangat besar dari Tanwir Muhammadiyah itu, sehingga dirinya meminta keputusan yang lebih fleksibel yang kemudian menjadi ketetapan Sidang Tanwir yang intinya memberikan amanat kepada PP Muhammadiyah agar melakukan *ijtihad* politik untuk membentuk partai politik baru.

Dalam perkembangan berikutnya setelah melalui berbagai proses politik yang berliku-liku, akhirnya, Amien Rais sampai pada ketetapan untuk mendirikan partai politik baru yakni Partai Amanat Nasional. Karena itu, pada Pleno PP Muhammadiyah bersama Ketua-Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia di Jakarta pada 22 Agustus 1998 diputuskanlah ketetapan untuk memberikan izin kepada Dr. M. Amien Rais untuk melepaskan jabatan Ketua PP Muhammadiyah dan selanjutnya memimpin Partai Amanat Nasional. Ketua PP Muhammadiyah kemudian dijabat oleh Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, sedangkan Amien Rais masih tetap dalam kepengurusan sebagai anggota PP Muhammadiyah dan Ketua Majelis Hikmah PP Muhammadiyah.

Di kalangan sebagian warga Muhammadiyah sering terdapat diskusi apakah kehadiran PAN itu merupakan hasil *ijtihad* politik PP Muhammadiyah atau sekedar *ijtihad* politik Amien Rais sendiri. Hal ini menggambarkan adanya dinamika internal di tubuh organisasi ini antara yang berpandangan formalistik-organisatoris dengan pandangan substansialis-fungsional. Pandangan pertama cenderung mencari legitimasi formal secara kelembagaan; sedangkan pandangan kedua lebih pada peran fungsional dalam menentukan sikap politik sejauh senapas dengan misi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah *amar makruf nahi munkar*.

Lepas dari perdebatan internal itu satu hal yang tampaknya tidak dapat dihapuskan dari kenyataan sosiologis bahwa kendati PAN tidak lahir langsung dari rahim organisasi Muhammadiyah namun hal itu tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara langkah Amien Rais sebagai Ketua PP Muhammadiyah dalam gerakan reformasi dengan dukungan sidang Tanwir Muhammadiyah Semarang dan Pleno Muhammadiyah 22 Agustus di Jakarta.

Muhammadiyah sendiri cukup taktis dengan tetap berpijak pada Khittah Ujung Pandang 1971 yang menjaga jarak yang sama dengan organisasi politik manapun, sehingga tidak mensubordinasikan diri dengan PAN dan relatif bebas dari kontaminasi konflik yang keras dalam proses politik nasional.

Akan tetapi, secara *de facto*, mayoritas elit pimpinan Muhammadiyah di hampir seluruh tingkatan kepemimpinan terlibat menjadi inisiator dan pengurus PAN maupun sebagian besar warga Muhammadiyah yang menjadi basis pendukung utama partai reformasi ini, sehingga keberadaan partai baru ini tetap terkait dengan dinamika gerakan Muhammadiyah. Dalam kenyataan sosiologis sebagaimana dipaparkan itulah dapat dijelaskan kecenderungan kedekatan PAN dengan Muhammadiyah, yang tentu saja berbeda dengan partai-partai politik lain yang tumbuh pada era reformasi itu kendati secara organisasi Muhammadiyah tetap menjaga jarak yang sama.

Patut disayangkan nasib PAN tidak terlalu baik karena hanya menempati urutan kelima dari lima Parpol peraih suara signifikan Pemilu 1999 dan posisi rangking ke 7 dalam Pemilu 2004. PAN mendapat suara tidak lebih dari 10% dalam Pemilu 1999 dan tidak lebih dari 8% dalam Pemilu 2004. Sungguhpun suaranya tidak lebih dari 10% dalam Pemilu 1999 namun Amin Rais mampu menempatkan diri sebagai ketua MPR.

Sekali lagi patut disayangkan partai yang disebut sementara kalangan sebagai partai “Eksperimen” tak mampu mengantarkan maestro politiknya ialah Amien Rais sebagai orang pertama di republik ini. Sungguhpun dalam pemilu 2004 mengalami penurunan perolehan suaranya di DPR (tidak lebih 8%) di DPR namun dengan kuantitas kursinya bertambah dari pemilu sebelumnya di atas perolehan kursi PKB, PKS dan Partai Demokrat walaupun secara rangking 7 besar PAN dibawah PKB, PKS dan partai Demokrat.

Agaknya konstituen pemilih belum siap menerima partai baru yang reformis dengan artikulasinya progresif untuk tidak mengatakan ekstrem. Tentu saja faktor-faktor lain ikut mempengaruhi nasib PAN, antara lain: secara internal dan kinerja PAN dan kuatnya tarik menarik kepentingan politik “faksi-faksi” dalam PAN, juga kekuatan-kekuatan politik nasional yang masih didominasi kelompok status quo dan kelompok-kelompok lain yang cenderung mengambil jalan pragmatis.

Munculnya Amien Rais dan PANnya, sekali lagi mencerminkan prinsip-prinsip yang dibangun Muhammadiyah: sebagai saluran aspirasi politik Muhammadiyah, selain partai-partai yang lain. Juga tetap menjaga dan mencitrakan keunggulan Islam dan keanggunan umat Islam, sungguhpun pada era reformasi ini tidak mesti coraknya sama dengan corak Masyumi awal yang terwadai dalam satu institusi, namun mengalami keragaman institusi. Ini sebuah realita sekaligus Sunatullah.

Keragaman institusi harus beraxis pada spirit jama'ah dan berorientasi pada izzul islam wal muslimin tanpa harus kehilangan solidaritas kemanusiaan. Hal mana telah diteladankan Amien Rais dalam kedudukannya sebagai ketua MPR (1999-2004) lewat poros tengahnya dan Kyai Dahlan dalam memfasilitasi Kongres Budi Utomo tahun 1917 di Kauman, Yogyakarta dan Kongres Islam Indonesia pertama tahun 1922 di Cirebon.

Partai Matahari Bangsa (PMB) semula bernama PAM, sebuah perhimpunan gerakan kultur yang di deklarasikan 9 Maret 2005 di kantor PP Muhammadiyah Jakarta dan di bidani anak-anak muda Muhammadiyah, menyusul rekomendasi sidang Tanwir di Mataram tahun 2004. Kini PAM menjadi partai politik. Kita berpesan kiranya bisa menangkap benang merah dari eksistensi dan aktualisasi partai politik dan lembaga-lembaga formal politik yang menjadi aspirasi Muhammadiyah dengan tetap berprinsip dwi fungsi, disatu sisi sebagai kanal atau saluran aspirasi politik Muhammadiyah, disisi lain tetap terjaga izzul Islam wal muslimin, keanggunan umat dan keunggulan dunia Islam, tanpa memperdebatkan pendekatan agama dan politik secara formalitas, substansialitas atau pendekatan fungsionalitas.

Muhammadiyah dan Politik Lokal

Fokus eksplorasi isu ini membidik pemilu pilkada dan legislatif pada tingkat daerah. Sejak kran demokrasi dibuka dan memperoleh bentuknya pada pemilu langsung pertama pada tahun 1999 dengan menyisakan pemilihan kepala daerah. Namun sejak tahun 2004, pemilihan kepala daerah secara langsung mendapatkan payung hukum lewat undang-undang RI nomor 32 tentang pemerintahan daerah. Bahkan pilkada termasuk bagian pemilu yang tidak terpisahkan dengan pemilu legislatif dan presiden.³⁶ Politik lokal dalam pemilu legislatif dan eksekutif

meniscayakan keterlibatan langsung masyarakat untuk memilih wakil atau pemimpinnya, selain harus ada peserta pemilu baik perorangan maupun kelembagaan, pengelola (kpu) dan logistik, serta pengawas, pemantau, dan badan kehormatan pemilu.

Posisi Muhammadiyah dan politik lokal tercover dalam panduan kebijakan, terutama pada program politik muktamar 45 di Malang (2005) rekomendasi sidang Tanwir di Mataram (2004) dan teologi politiknya khususnya pada Khittah kehidupan bangsa dan bernegara (2002), pedoman hidup Islami menurut Muhammadiyah, muqodimah anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.

Pada tataran praksis, pemilu legislatif dan eksekutif pada tingkat lokal (termasuk nasional), masih menempatkan sang *fail* (peserta) untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh beberapa kebutuhan. Pertama, setidaknya-tidaknya membutuhkan dukungan logistik yang memadai. Tanpa harus dikendalikan oleh broker atau pemilik modal. Jika ini terjadi, maka harga politik yang harus dibayar cukup mahal. Bila terpilih, kompensasi untuk broker atau pemilik modal bisa mengendalikan kebijakan dalam pemerintahan atau legislasi. Kedua, jaringan dan dukungan basis massa, terutama ditingkat *grassroad*. Ketiga, jaringan dan dukungan emosional pada etnisitas. Sejak daerah diberikan otoritas lewat otonomi daerah, politik identitas menyeruak dan polarisasi komunitas, terutama menjelang, selama proses, dan pasca pemilu tak terhindarkan baik secara terbuka atau pun samar-samar. Dukungan politik identitas diarahkan untuk mem-*back up* kebutuhan dan dukungan yang lain. Memang harus diwaspadai kompensasi pasca pemilu dengan asumsi memperoleh kemenangan dalam pemilu. Jika tidak hati-hati bisa mejebak posisinya dalam bentuk nepotisme yang eksekutif. Keempat, pengakuan ketokohan yang visioner. Modal ketokohan saja dipastikan tidak cukup, tanpa dibarengi dengan visi yang jelas dalam mencerahkan dan menyejahterahkan rakyat jamak, selain komitmennya teruji dalam moralitas. Kelima, memiliki jam terbang atau pengalaman *leadership* dan manage komunitas dan masyarakat jamak. Keenam, peneguhan super ego lewat komunikasi spiritual yang intensif dan kualitatif. Ketujuh, siaga satu dan antisipatif dalam serangan gerakan atau aksi kemungkaran, termasuk *pressure* tekanan dari preman ‘jalanan’, ‘berdasi’ atau ‘bersarung’.

Akankah warga atau pun pimpinan Muhammadiyah siap berlaga dalam pemilu legislatif dan khususnya eksekutif ? sementara tak terhindarkan adanya keberlangsungan budaya *money* politik, hubungan sosial keetnisan, premanisme dan persinggungan spiritual “abu-abu” – untuk tidak menyebut “hitam” yang sedikit banyak menggerus energi positif dan mengepung upaya-upaya dari misi amar ma’aruf nahi munkar. Agaknya budaya atau gaya hidup Muhammadiyah di lapangan belum teruji dengan hal di atas. Apa yang harus dibenahi ? mari kita sharing gagasan, dan untuk selanjutnya bisa diaktualisasikan secara kolektif.

Catatan Samping :

1. Umar Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990, hlm. 175.
2. Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: Grafiti, 1997, hlm. 190-194.
3. Mahasin, ed. *Islam Dotrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992, hlm. 311.
4. M. Yusron Asrofi. *KH Ahmad Dahlan: Pemikiran dan Kepemimpinannya*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1983, hlm. 95.
5. R.H Hadjid, ed., *Ajaran KH Ahmad Dahlan Sengan Tujuh Belas Kelompok Ayat-ayat ALquran* (Yogyakarta; Yayasan Dana Bantuan Calon Haji Indonesia, Tanpa Tahun), hal 60.
6. *Ibid.*
7. Selain isu politik "Persatuan Dunia Islam", Ahmad Dahlan juga menyampaikan gagasan dasar pembaharuan dalam Islam dan pencerahan anak bangsa lewat dakwah cultural atau pendidikan modern. Lihat, Hamka. *Muhammadiyah-Masyumi*. Jakarta: Masyarakat Islam, t.t., him. 15; Abdul Munir Mulkhan. *Warisan Intelektual KH Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*. Yogyakarta: Persatuan, 1990, hal; 156 - 168; Abdul Munir Mulkhan. *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hal; 231 - 243; Mohammad Djasman Alkindi. "Gagasan dan Pikiran Ahmad Dahlan", dalam *Almanak Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh, 1995/1416, hal; 206 - 223; Ahmad Dahlan. "Tali Pengikat Hidup Manusia", dalam *Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah Dari Masa ke Masa*. ed. Sukrianta dan Abdul Munir Malkhan. Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985, him. 1-9. Pada tahun yang sama (1922) tepatnya sebelum kongres Islam di Cirebon, Ahmad Dahlan telah membentuk satu organ di lingkungan Muhammadiyah dengan nama "Musyawarah Ulama" dengan susunan pengurus: Presiden (Raden Haji Muhammad Kamaludiningrat), Vice Presiden (Kyai P Abdullah Sirad), Sekretaris (Kyai Haji Chabiburran) dan Pent Mester (Kyai Haji Djalaluddin). Organ ini memperoleh bentuk final bernama Majelis Tarjih yang lahir tahun 1927 dan kini bernama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.
8. Abdul Munir Mulkhan. *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hal, 232.
9. *Ibid.*
10. *Ibid.*, hlm. 234.
11. *Ibid.*, hlm. 234-235.
12. Abdul Munir Mulkhan, *Warisan Intelektual*, 1990, hlm. 207.
13. Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran KH Ahmad Dahlan*, 1990, hlm. 225. 17. *Ibid.*, him. 223.

14. *Ibid.*, hlm. 225.

15. *Ibid.*, hlm. 226.

16. *Ibid.*

17. Akar-akar pemikiran politik Ahmad Dahlan, memperoleh format dalam memulai dan mengakhiri sebuah bangunan kekuasaan di Indonesia. Menjelang dan memasuki kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Muhammadiyah melalui tokoh-tokohnya, Ki Bagus Hadikusuma dan Abdul Kahar Mudzakir -selain Mas Mansur, Kasman Singodimedjo dan Soekiman-menyampaikan gagasan-gagasan politiknya di dalam sidang-sidang BPUPKI, Panitia Sembilan dan PPKI akan urgensi dan relevansinya negara yang akan dibangun berdasar Islam, di tengah-tengah kuatnya usulan negara berdasarkan Pancasila, dan mencapai kompromi dua tahap. Tahap pertama, lewat hasil kerja Panitia Sembilan yang di dalamnya ada Abdul Kahar Mudzakir. Kompromi tersebut terjadi tanggal 22 Juni 1945 sebagai rancangan dari Panitia Sembilan, dan untuk selanjutnya disahkan dalam Sidang Pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, adalah negara berdasar Pancasila, dengan pengertian Sila Ketuhanan disertakan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya. Kompromi kedua, hasil lobi tokoh-tokoh Islam: Hatta, Ki Bagus, Wahid Hasim, Kasman dan Tengku Mohammad Hasan, clan seterusnya disepakati dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Kompromi yang dimaksud-sampai hari ini masih berlaku-adalah negara berdasar Pancasila. Dalam pengertian Sila Ketuhanan ditambah dengan anak kalimat Yang Maha Esa.

Ada satu dokumen yang mengisyaratkan pemikiran politik Muhammadiyah secara formal kelembagaan, yaitu konsepsi negara Islam yang disusun oleh Prof. Abdul Kahar Muzakir, anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah terpilih dalam Mukhtar ke 32 di Purwokerto tahun 1953. Dalam Mukhtar tersebut mengagendakan perlunya Muhammadiyah mempunyai konsepsi negara Islam, dan disetujui oleh peserta Mukhtar agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk tim untuk keperluan tersebut. Pada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1955 di Pekajangan (Pekalongan) Jawa Tengah, Abdul Kahar Muzakir menyampaikan prasaran konsepsi negara Islam. Oleh peserta prasaran tersebut diterima dengan dua catatan: *pertama*, agar konsepsi negara Islam disempurnakan. *Kedua*, setelah disempurnakan, agar dikirimkan kepada seluruh anggota Tanwir se-Indonesia untuk dimintakan pendapatnya. Apa kandungan dari konsepsi negara Islam tersebut ?

Negara Islam dalam pemahaman Muzakir adalah suatu negara yang diatur dan diperintah dengan ajaran-ajaran dan undang-undang Islam. Artinya, suatu negara dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam ilmu negara-daerah terbatas, pemerintahan, undang-undang dan rakyat yang dipimpin oleh pemerintah menurut yang ditentukan. dalam Islam dan negara tadi berundang-undang yang bersumber pada al-Quran, al-Hadits, al-Qiyas, dan al-Ijmak.

Namun demikian, Muzakir tetap membedakan antara Darul Islam dan Darul Harb." Ia mengajukan definisi Darul Islam dengan mengutip kitab al-Tasyrik al-fihana al-Islami karangan Abdul Qadir Audah (pemimpin Al-Ihwan Al-Muslim), pertama, tiap-tiap negara yang penduduknya semuanya kaum muslimin, kedua, tiap-tiap negara yang dikuasai dan diperintah oleh kaum muslimin, walaupun penduduk yang terbanyak bukan kaum muslimin, dan keempat, tiap-tiap negara yang dikuasai dan diperintah oleh bukan kaum muslimin, tetapi penduduknya yang kaum muslimin dapat menjalankan hukum-hukum Islam atau tidak ada halangan untuk menjalankan hukum Islam. Setelah memberi definisi negara Islam atau Darul Islam tersebut, Muzakir mempertanyakan, apakah negara Republik Indonesia sekarang dapat dinamakan negara Islam? Jawabannya: bisa, yaitu bila negara diatur dengan undang-undang Islam-termasuk para pemimpinnya beragama Islam"-dan mayoritas penduduknya muslim."

Ki Bagus Hadikusuma sebagai tokoh vokal yang mewakili golongan Islam-yang berjumlah 15 dan 62 anggota BPUPKI-dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945 pukul 15.00 mengeluarkan pernyataan yang intinya. "membangun negara di atas dasar ajaran Islam", enam kali dalam bentuk perintah, harapan, atau anjuran dan dua kali dalam bentuk pernyataan, yaitu sebagai berikut:

Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini.

Umat Islam adalah umat yang mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia sejak dahulu hingga sekarang ini, seterusnya pada masa yang akan datang, yaitu dimana ada kemungkinan dan kesempatan pastilah umat Islam akan membangunkan negara atau menyusun masyarakat yang didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam. Gagasan Ki Bagus yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara tersebut didasarkan pada alasan sosiologis-historis dan pemahaman atas ajaran Islam.

Alasan *sosiologis-historis*. Menurut Ki Bagus, agama Islam paling tidak sudah enam abad menjadi agama bangsa Indonesia, atau setidaknya sudah tiga abad sebelum Belanda menjajah. Hukum Islam sudah berlaku di Indonesia dengan sebaik-baiknya serta dapat membawa berkah manfaat dan maslahat bagi rakyat umumnya, di dunia dan di akhirat. Banyak sekali hukum Islam yang sudah menjadi adat-istiadat bangsa Indonesia. Oleh-karena itu, untuk menyesuaikan dasar negara Indonesia dengan jiwa rakyatnya, kata Ki Bagus, "tuan-tuan harus mengetahui betul-betul adanya jiwa ke-Islaman rakyat." Ki Bagus meminta agar aspirasi penduduk, yang mayoritas muslim, dihayati, bahkan pada tataran praktis, para pemimpin bangsa-yang dikatakan oleh Ki Bagus sebagai pengemban tugas kenabian hendaknya tinggal di desa agar tidak salah dalam meng-cover dan merekam aspirasi penduduk. Selengkapnya Ki Bagus mengatakan:

Selamilah jiwa rakyat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar tata negara kita, supaya nanti negara kita ini dapat menjadi negara yang kuat dan sentosa. Tinggalah di desa-desa dan di kampung-kampung untuk mengetahui keadaan jiwa

dan kehidupan murba (rakyat banyak) yang sebenar-benarnya. Di situ tentu tuan-tuan nanti akan mendapati bahwa rakyat yang terbanyak memang berjiwa Islam. Mayoritas penduduk yang berjiwa Islam ini tidaklah pasif, tetapi aktif dan terus-menerus hidup bersemangat. Jiwa yang demikian oleh Ki Bagus dikatakan semata-mata karena mengandung iman yang andal dan bersandar pada ajaran Islam yang tertuang dalam kitab suci AlQuran dan pemahaman rasional dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Iman yang demikian dicerahkan sedikitnya oleh salat lima waktu, berpuasa sebulan setiap tahun dan berani mengeluarkan zakat dua setengah persen dari hartanya setiap tahun untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Jiwa yang hidup itu mengerakkan aktivitas sosial. Meskipun keadaan ekonomi bangsa kita pada umumnya boleh dikatakan masih sangat rendah dan lemah-sebagai akibat penindasan dan pemerasan kolonial Belanda-kaum muslimin tetap dapat mendirikan beribu-ribu pondok pesantren, langgar (mushala) dan masjid yang dipergunakan untuk keperluan umum. Di masa modern ini, dibangun pula beribu-ribu sekolah, madrasah dan berbagai balai pertolongan, seperti rumah sakit, rumah yatim, dan sebagainya. Demikian pula, jiwa yang hidup di setiap saat dengan amat mudah dapat dibangkitkan serentak, dengan mengeluarkan api yang berkobarkobar untuk berjuang mati-matian membela agamanya serta mempertahankan tanah air dan bangsanya. Ki Bagus mengingatkan bahwa realitasnya, para pejuang yang dahulu membela negara ini adalah muslim. Ki Bagus mengatakan:

Cobalah tuan-tuan ingat sejarah Indonesia di masa akhir-akhir ini (sebelum 1945). Siapakah yang berani menentang imperialis Belanda? Bukankah Diponegoro? Bukankah Teuku Umar, Imam Bonjol dan kiai-kiai lainnya yang beliau itu penganjur dan pendekar rakyat yang berpegang teguh kepada Islam serta mendasarkan perjuangannya di atas dasar agama Islam?

Ki Bagus juga menyoroti realitas bahwa organisasi pergerakan yang dengan cepat memperoleh sambutan luas dari masyarakat Indonesia-mulai dari yang ada di Jawa, sampai yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain-tidak lain adalah yang mendasarkan gerakannya pada Islam. Dalam hal ini adalah Syarikat Islam, bukan Budi Utomo ataupun Indische Partai.

Jadi, kesimpulan Ki Bagus, sudah terang dan jelas bahwa di dalam umat Islam tersembunyi jiwa yang hidup, aktif dan bersemangat. Dan, jelas terlihat adanya pengaruh agama Islam yang sangat kuat dan mendalam pada rakyat Indonesia. Pada bagian lain, Ki Bagus menyatakan kekhawatirannya apabila negara ini tidak berdiri di atas agama Islam. Bila demikian halnya, menurutnya, mayoritas penduduk yang muslim ini akan bersikap dingin, pasif dan tiadak mengambil peran pro-aktif dalam pembangunan.

Pandangan sosiologis-historis Ki Bagus-sebagai landasan tesisnya tentang Islam sebagai dasar negara-ternyata cocok dengan pandangan mitra selembaga, Muzakir. Menurut Muzakir, alumnus Universitas Dar al-Ulum Mesir, Islam yang tersiar di Indonesia dan Melayu sejak lebih dari tujuh abad silam merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah. Bahwa hampir 90 persen bangsa Indonesia

dan Melayu telah meninggalkan agama nenek moyang mereka clan memeluk agama Islam juga suatu kenyataan. Bahwa sebelum bangsa Barat datang, di Indonesia dan Melayu telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam atau bersifat Islam atau melakukan ajaran-ajaran dan hukumhukum Islam-seperti Kerajaan Aceh, Minangkabau, Palembang, Banten, Cirebon, Demak, Pajang, Mataram, Mongkasaran, Bone, Banjar Samarinda, Pontianak, Sambas, Sumbawa-adalah suatu kenyataan tidak terbantah. Bahwa negara-negara tersebut sebelum bangsa Barat datang merupakan negara merdeka adalah suatu kenyataan sejarah.

Bahwa negara-negara Islam dahulu telah menjalankan hukum-hukum Islam sebagai dasar perundang-undangan adalah juga nyata. Bahwa sebagian dari Undang-undang itu masih tampak peninggalannya adalah nyata pula. Bahwa kemudian-setelah penjajah Barat datang di tanah air-para pemimpin, kepala negara, ulama dan rakyat Indonesia bersama-sama melawan mereka memang benar-benar nyata. Bahwa pendorong perjuangan mereka adalah agama Islam adalah nyata pula. Dan, setelah mereka kalah, satu persatu diadu domba. Upaya penjajah untuk melenyapkan negara-negara itu dengan menghapuskan hukum agama merupakan kenyataan sejarah. Bahwa rencana-rencana itu masih berbekas clan memengaruhi sebagian yuristen (ahli hukum) Indonesia dewasa ini adalah suatu kenyataan. Bahwa mereka ini kini berkuasa dan dapat menghalangi usaha-usaha melahirkan perundang-undangan bangsa berdasarkan Islam adalah suatu kenyataan pula. Muzakir juga mengakui bahwa pada zaman penjajahan Jepang dan zaman Republik Indonesia, belum ada kemajuan dalam perundang-undangan Islam.

Alasan pemahaman atas ajaran Islam. Ki Bagus mendasarkan keinginannya agar Islam dijadikan dasar negara pada pemahaman atas ajaran Islam secara substansial clan menyeluruh. Bagi Ki Bagus, substansi clan sistematika ajaran Islam meliputi: iman, ibadah, amal saleh clan jihad. Keempat aspek ajaran ini merupakan ringkasan ajaran Islam yang telah diajarkan dan dipimpinkan oleh para nabiullah dalam rangka memperbaiki masyarakat atau negara. Lima tahun kemudian, ringkasan ajaran Islam yang telah disampaikan dalam forum sidan BPUPKI (1945) ini juga disampaikan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-31 (1950), dengan penambahan dua aspek ajaran, yaitu meneladan pada para nabiullah, terutama Nabi Muhammad saw clan berorganisasi (bernegara). Keduanya merupakan kiat strategi perjuangan yang tidak bisa ditawarkan dalam menegakkan clan menjunjung tinggi agama Islam.⁴ Keenam aspek ajaran Islam itu merupakan suatu kesatuan yang bulat atau sistemik. Pandangan sistem ajaran Islam ini didasarkan pada asumsi Ki Bagus bahwa kandungan al Quran, tidak lebih 10% yang mengandung ajaran ibadah (ritual)

dan akhirat (keimanan), sedangkan yang 90% mengandung ajaran ketatanegaraan dan urusan keduniawian. Ki Bagus mengatakan: Al-Quran yang berisi lebih dari 6.000 ayat itu, hanya ada kirakira 600 ayat saja yang mengenai hal ibadat dan akhirat, sedang selebihnya mengenai tata negara clan urusan keduniaan.

Bagaimana pandangan Muzakir tentang hal ini? Tampaknya paralel juga. Muzakir berpendapat, Islam bukan hanya merupakan agama, tetapi juga negara. Muzakir menyatakan, kita berpaham bahwa agama Islam itu adalah tauhid, iman, ibadah, akhlak, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, undang-undang, peraturan, kebudayaan dan pedoman hidup yang dikaruniakan kepada Rasulullah dengan jalan wahyu untuk menjadi pedoman hidup bagi semua manusia di dunia ini dan apabila mereka dapat menjalankan dengan sebaikbaiknya, bukan saja mereka akan mencapai kehidupan yang sentosa, aman, sejahtera, bahagia dan mempunyai nilai tinggi dalam arena bangsa-bangsa umat manusia, akan tetapi juga akan hidup di akhirat nanti. Jadi, kesimpulan Muzakir atas paham ini, Islam adalah bukan agama saja, tetapi agama dan negara."

Zona amal saleh dalam term Ki Bagus dan zona negara dalam term Muzakir, yang sasaran bidiknya adalah seluruh manusia, menuntut prinsip-prinsip pengaturan dalam semua aspek. Prinsip-prinsip tersebut adalah syura, keadilan dan toleransi, nasionalisme (persatuan) dan pertahanan nasional serta kesejahteraan (ekonomi). Syura dalam pandangan Ki Bagus adalah permusyawaratan untuk menyelesaikan masalah bersama dengan mempersatukan pandangan yang mungkin bertentangan, sehingga menjadi pandangan yang bulat. Hal ini sangat mungkin bila musyawarah itu didasarkan pada spiritual tingkat tinggi, misalnya motivasi ikhlas, steril dari kepentingan individu dan golongan serta kejujuran. Kutipan di bawah ini memberi penegasan gagasan syura Ki Bagus: ...permusyawaratan seperti sekarang ini (dalam sidang BPUPKI tahap I, penulis) yang maksudnya akan membereskan sesuatu perkara dengan jalan mempersatukan pendapat-pendapat yang bertentangan sehingga menjadi bulat...

Bila pembicaraan dan permusyawaratan tidak didasarkan kesucian, keikhlasan dan kejujuran, tetapi untuk menang sendiri, mau mendapat nama sendiri dan mau enak sendiri atau berdasarkan kekhawatiran tidak akan mendapat pangkat atau kursi, sudah pasti akan timbul perpecahan dan perbantahan yang lebih dalisayat dan berbahaya.⁵¹ Mengenai keadilan dan toleransi, Ki Bagus mengatakan:

Dalam negara kita, niscaya tuan-tuan menginginkan berdirinya satu pemerintahan yang adil dan bijaksana, berdasarkan budi pekerti yang luhur, bersendi permusyawaratan dan keputusan rapat, serta luas dan lapang dada, tidak memaksa tentang agama. Jika tuan-tuan benarbenar menginginkan keadilan dan toleransi, maka dirikanlah pemerintah ini atas dasar Islam, karena Islam mengajarkan masalah tersebut. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 90, an-Nisa' ayat 5, Ali Imran ayat 159, asy-Syura ayat 38 dan al-Baqarah ayat 256.

Dengan ayat-ayat yang singkat ini cukuplah kiranya untuk mengetahui bahwa agama Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan Republik Indonesia."Mengenai nasionalisme/persatuan, Ki Bagus mengatakan: Tentu saja tuan-tuan menghendaki negara kita ini mempunyai rakyat yang kuat bersatu, erat persaudaraannya lahir-batin. Kalau memang demikian, maka marilah kita bangunkan negara kita (agar) berdiri di atas dasar-dasar ajaran agama Islam untuk mencapai persatuan yang kokoh seperti

yang difirmankan Allah: Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh dengan tali Allah (agama Islam) dan jangan kamu sekalian bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, yaitu dahulu kamu bermusuhan satu dengan lainnya, tetapi sekarang Allah berkenan mempersatukan hati kamu sekalian, sehingga dengan nikmat-Nya tadi, kamu sekalian dapat menjadi bersaudara se-erat-eratnya. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan atas kebaikan dan taqwa kepada Allah.

Mengenai ketahanan nasional/negara, Ki Bagus mengatakan: Bangunlah negara ini atas firman-firman Allah, antara lain dalam surat al-Anfal ayat 62 dan surat ash-Shaf ayat 2, 3, 4, 10, 11, 12 dan 13.,

Katanya selanjutnya: Tuan-tuan yang terhormat, maksud ayat-ayat tersebut sudah jelas, ialah menyuruh kita senantiasa bersiap sedia untuk menolak setiap serangan musuh yang mungkin datang memukul kita dan menyuruh kita mencurahkan segala tenaga dan harta benda yang ada pada kita untuk menyediakan segala kekuatan perang sehingga dapat menegakkan keadilan dan kebenaran... Oleh karena itu, bangunlah negara kita ini dengan sendi agama Islam.

Mengenai kesejahteraan/ekonomi, Ki Bagus mengatakan, berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 14, Allah menyuruh kita mencari rejeki Allah di atas dan di dalam laut dengan mengusahakan perikanan, pelayaran, pencarian mutiara dan sebagainya. Dalam konteks ini, masih banyak ayat-ayat yang semakna dengan pengertian menganjurkan pertanian, pengairan, peternakan, pertanahan dan sebagainya, sebagaimana dalam al Quran surat Ibrahim, an-Nahl, alHaj dan lain-lainnya.

Akhirnya, Ki Bagus mengakhiri pidatonya dengan penegasan ulang perlunya Islam sebagai dasar [negara. Ia](#) mengatakan: Paduka tuan ketua, sidang yang terhormat! Pembicaraan saya yang sedikit panjang ini rupanya sudah cukup dan tidak ada lagi yang perlu saya paparkan. Maka, akan saya tutup pidato saya ini dengan mendoa kepada Allah: Mudah-mudahan negara Indonesia baru, yang akan datang itu, berdasarkan agama Islam dan akan menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh. Amin!

Tampaknya pidato Ki Bagus yang disampaikan pada 31 Mei 1945 pukul 15.00 dalam sidang BPUPKI ini merupakan respons atas pidato-pidato kelompok kebangsaan sebelumnya pada 29, 30 dan 31 (pagi) Mei 1945. Sayangnya, pidato Ki Bagus dan golongan Islam lainnya seperti Mas Mansur, Muzakir, Sukiman dan Wahid Hasjim tidak dimuat dalam dokumen negara yang disusun oleh Mohammad Yamin. Demikian pula yang terjadi dengan pidato Mohammad Hatta, sehingga Hatta menyebut Yamin "manusia licik". Sehari sesudahnya, 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato hari terakhir dalam sidang babak pertama BPUPKI. Kini, timbul pertanyaan menggoda, apakah perjuangan golongan Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara di dalam sidang BPUPKI babak kedua (10-16 Juli 1945) dan sidang PPKI (18 Agustus 1945) tersebut berhasil secara maksimal, berhasil secara minimal atau gagal? Pertanyaan tersebut akan dipaparkan dalam uraian selanjutnya.

Aktualisasi Pemikiran Politik. Mengingat Ki Bagus dan Muzakir sebagai anggota BPUPKI -selain Mas Mansur dan Sukiman dari Muhammadiyah- dan keduanya telah menyampaikan gagasan-gagasan politiknya dalam sidang BPUPKI tahap pertama (29-1 Juni 1945). Sebelum sidang BPUPKI tahap kedua (terakhir) tanggal 10-16 Juli 1945, dalam masa reses 40 hari (2 Juni-9 Juli 1945) telah terbentuk Panitia Sembilan yang salah satu anggotanya adalah Abdul Kahar Muzakir. Menurut Muzakir, hanya 25 persen (15 dari 60/62) anggota BPUPKI yang mewakili umat Islam. Dan, 15 orang inilah yang memilih dan memperjuangkan aspirasi Islam sebagai dasar negara.

Dalam masa reses selama hampir 40 hari, 2 Juni-9 Juli 1945 (karena sidang-sidang BPUPKI babak pertama berlangsung pada 29 Mei-1 Juni 1945, sementara babak kedua baru berlangsung pada 10-16 Juli 1945), terbentuklah panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang, karenanya lebih dikenal dengan Panitia Sembilan. Hasil kerja sembilan orang ini pada kemudian hari disebut oleh Mohammad Yamin sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Sembilan orang itu ialah Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, A. Wahid Hasjim dan Mohammad Yamin. Kesembilan orang ini benar-benar mewakili alam dan aliran pikiran yang hidup dalam masyarakat. Anshari membuat perbandingan antara anggota yang nasionalis Islami dengan yang nasionalis sekuler, yaitu 4: 5. Empat orang nasionalis Islami ialah Abikusno Tjokrosujoso dari unsur Partai

Syarikat Islam Indonesia (PSII), Abdul Kahar Muzakir dari unsur Muhammadiyah, H. Agus Salim dari unsur Partai Penyardar (setelah keluar dari PSII) dan A. Wahid Hasjim dari unsur NU. Sedangkan 5 orang nasionalis sekuler ialah Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Ahmad Soebardjo dan Mohammad Yamin. Secara internal, kelompok nasionalis Islami terdiri dari dua unsur, wakil organisasi politik dan wakil organisasi kemasyarakatan. Yang disebut terakhir, diwakili oleh Muhammadiyah dan NU, masing-masing Abdul Kahar Muzakir, alumnus Universitas Dar al-Ulum Mesir dan A. Wahid Hasjim, alumnus pesantren.

Setelah Panitia Sembilan bergumul selama 21 hari, 2-22 Juni 1945, akhirnya tercapai konsensus antara dua pola pemikiran: Islam sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konsensus ini, Pancasila diterima sebagai dasar negara dengan beberapa perubahan. Sila Ketuhanan diletakkan di urutan pertama dengan penambahan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Konsensus dalam Panitia Sembilan ini sifatnya sementara karena baru berupa rancangan dan harus dilaporkan kepada sidang komisi dan pleno BPUPKI. Dan, konsensus tersebut ternyata diperbincangkan dua kali dalam suasana yang cukup panas dan menegangkan, yaitu pada 11 dan 14 Juli 1945. Baru pada perbincangan kedua disahkan dengan suara bulat.

Pada sidang pertama babak kedua 10 Juli 1945, setelah Soekarno menyampaikan rancangan Piagam Jakarta, kemudian diperdebatkan masalah bentuk pemerintahan bagi negara baru, republik atau kerajaan. Hasilnya, 53 suara

memilih bentuk republik dan 7 suara memilih bentuk kerajaan. Sebelum diadakan pemungutan suara, Ki Bagus diminta untuk memimpin acara mengheningkan cipta dengan membaca al-Quran, surat al-Fatihah.

Pada sidang hari kedua 11 Juli 1945, tiga orang anggota BPUPKI menyampaikan keberatan terhadap rancangan Piagam Jakarta, Pertama Latuharhary (Protestan) menyatakan keberatan terhadap anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya. Dasar pemikirannya ialah kekhawatirannya terhadap implikasi dari anak kalimat tersebut, terutama bagi umat agama lain, yang bisa menimbulkan kekacauan, misalnya dalam adat-istiadat. Kekhawatiran ini ditanggapi secara spontan oleh anggota Panitia Sembilan, H. Agus Salim. Ia mengatakan: Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukan masalah baru dan pada umumnya sudah selesai. Lain daripada itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu khawatir bahwa keamanan mereka itu tidak tergantung pada kekuasaan negara, tetapi pada adat (kebiasaan) umat Islam yang 90% itu.

Dalam istilah Boland, keamanan mereka tergantung pada "toleransi tradisional umat Islam". Kemudian, Soekarno selaku ketua sidang mengingatkan mereka, bahwa preamble tersebut telah disusun dengan susah payah dan merupakan hasil kesepakatan antara golongan Islam dan kelompok kebangsaan. Menurutnya, hilangnya kalimat yang satu ini tidak akan dapat diterima oleh kaum Muslimin.

Keberatan kedua dan ketiga, berturut-turut, datang dari Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat (nasionalis sekuler). Keberatan kedua orang itu sama seperti keberatan Latuharhary, meskipun argumentasinya berbeda. Keduanya mendasarkan keberatannya pada logika sektarianisme Islam. Mereka menyatakan, kalimat itu kemungkinan besar akan menimbulkan fanatisme karena kelihatannya kaum muslimin akan dipaksa mematuhi syariat. A. Wahid Hasjim, anggota Panitia Sembilan, kemudian menanggapi, ia membantah adanya paksaan ini dengan menunjuk pada asas permusyawaratan, sambil menambahkan bahwa menurut pendapat sebagian orang, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya telah menjangkau terlalu jauh, tetapi menurut pendapat sebagian orang lainnya, cakupannya justru kurang jauh. Pada sidang pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, Ki Bagus sampai dua kali meminta supaya kata-kata yang disebut terakhir, yaitu bagi pemeluk pemeluknya dihilangkan. Soekarno, sekali lagi, mengulangi peringatannya, bahwa kalimat itu merupakan jalan tengah yang didapat dengan susah payah. Oleh karena pokok-pokok yang lain kiranya tidak ada yang menolak, maka pokok-pokok dalam preamble dianggap sudah diterima.

Peristiwa 18 Agustus 1945. Persetujuan bulat Muqaddimah t7ndang-undang Dasar pada 14 Juli 1945 dari golongan Islam dan kelompok Kebangsaan hanya sampai 18 Agustus 1945. Itu artinya hanya mampu bertahan 35 hari. Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu terjadi suatu peristiwa, yang oleh Prawoto Mangkusasmito disebut sebagai "pengkhianatan bangsa." Bagi golongan Islam peristiwa itu

memang menyakitkan, tetapi bagi kelompok Kebangsaan merupakan kemenangan. Sebenarnya, apa yang terjadi pada 18 Agustus 1945?

PPKI, yang dijanjikan Jepang dan dibentuk secara resmi pada 14 Agustus 1945, mengadakan rapat pertamanya pada 18 Agustus 1945 dan dibubarkan pada 29 Agustus 1945, kemudian diubah menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). PPKI yang hanya berumur setengah bulan ini mampu mengukir sejarah spektakuler bagi pembangunan pondasi politik di Indonesia karena berhasil melaksanakan tugas dengan mengesahkan dan menetapkan Undang-undang Dasar 1945 (yang sampai sekarang masih berlaku) serta memilih dan menetapkan presiden beserta wakilnya. Meskipun demikian, komposisi anggota PPKI dan hasil kerjanya sangat menyakitkan golongan Islam.

Prawoto Mangkusasmito menyebutkan, kelakuan golongan Islam dalam PPKI hanya 11 persen. tepatnya 3 dari 27 anggota. Semula anggota PPKI hanya 21 orang, dari golongan Islam 2 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusuma dan A. Wahid Hasjim. Namun, Soekarno, selaku ketua PPKI, menambahkan enam orang, satu diantaranya dari golongan Islam, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo, anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ketika itu menjabat sebagai Daidanco (komandan batalyon) Jakarta. Kedua puluh satu anggota PPKI tersebut ialah Soekarno, Mohammad Hatta, Soepomo, Radjiman Wediodiningrat, Soeroso, Soetardjo, A. Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusuma, Otto Iskandar Dinata, Abdul Kadir, Soerjomihardjo, Purobojo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary Amir, Abdul Abbas, Muhammad Hasan, Hamdani, Ratulangie, Andi Pangeran dan I Gusti Ketut Pudja. Sedangkan enam anggota tambahan ialah Mr. Kasman Singodimedjo, Wiranatakusuma, Ki Hajar Dewantara, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusumasumantri dan Mr. A. Soebardjo.

PPKI mengadakan rapat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Menurut jadwal, rapat dimulai pada pukul 09.30, akan tetapi sampai pukul 11.30 belum juga dimulai.

Apa yang terjadi selama dua jam itu? Pada momen inilah diadakan pertemuan mendadak beberapa anggota PPKI yang menginginkan perubahan substansial. Tepatnya, keputusan yang dihasilkan dalam sidang-sidang BPUPKI dengan melewati saat-saat yang cukup kritis ternyata dimentahkan oleh kelompok Kebangsaan. Tujuh kata dalam anak kalimat Ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya yang termuat dalam preamble dihapus dan diganti dengan Yang Maha Esa, dalam beberapa menit.

Masalah yang berhasil direduksi PPKI tersebut melahirkan banyak pertanyaan dari golongan Islam. Namun, ada baiknya kita ikuti jalan pikiran Mohammad Hatta mengenai latar belakang peristiwa 18 Agustus 1945. Hatta menerangkan bahwa pada 17 Agustus 1945 petang, seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang) datang kepadanya dan mengatakan bahwa kaum Protestan dan Katolik di dalam Kaigun sangat berkeberatan atas anak kalimat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar yang berbunyi: Ke-Tuhanan dengan kewajiban men-

jalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya. Mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat mereka dan hanya mengikat rakyat yang beragama Islam, tetapi mereka memandang hal itu sebagai diskriminasi terhadap mereka sebagai kelompok minoritas. Kepada opsir (namanya tidak diingat lagi oleh Hatta) itu, Hatta menanggapi, bahwa hal tersebut bukanlah diskriminasi, karena hanya mengikat rakyat yang beragama Islam. Ketika Pembukaan Undang-undang Dasar tersebut dirumuskan, Mr. A. A. Maramis-anggota Panitia Sembilan dari Kristen-tidak berkeberatan dan pada 22 Juni 1945 ikut membubuhkan tanda tangannya. Opsir tersebut kemudian mengatakan bahwa pada waktu itu mungkin Mr. Maramis tidak merasakan bahwa penetapan tersebut merupakan suatu diskriminasi. Kalau Pembukaan itu diteruskan juga apa adanya, kata opsir tersebut, maka kelompok Protestan dan Katholik lebih suka berdiri di luar republik. Opsir tersebut mengingatkan Hatta pada semboyan yang selama ini didengung-dengungkan, yaitu bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Hatta mengakui bahwa kata-kata opsir tersebut memengaruhi pendiriannya. Setelah terdiam sejenak, Hatta menjanjikan kepada opsir itu, bahwa besok dia akan menyampaikan masalah yang sangat penting itu dalam sidang PPKI Selanjutnya Hatta melaporkan: Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus sebelum sidang Panitia Persiapan bermula, saya ajak Ki Bagus Hadikusuma, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Sidongodimedjo dan Mr. Tuan Teuku Hasan dari Sumatera untuk mengadakan rapat pendahuluan membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kasus reduksi pada Pembukaan karya BPUPKI ini dipertanyakan oleh Prawoto Mangkusasmito dan Isa Anshary. Apa sebabnya rumusan Piagam Jakarta yang didapat dengan susah payah, dengan memeras otak clan tenaga selama berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa kita, kemudian di dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 dalam beberapa menit saja dapat diubah ? Mengapa Ir. Soekarno yang selama sidang-sidang Badan Penyelidik dengan mati-matian mempertahankan Piagam Jakarta kemudian justru memelopori usaha untuk mengubahnya ? Prawoto sendiri mengaku bahwa dirinya pun tidak tahu. Sementara itu, Isa Anshary dalam sidang Konstituante 1957 berkata: Kejadian yang menyolok mata itu dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu `permainan sulap' yang masih diliputi kabut rahasia... sebagai permainan politik `pat gulipat' terhadap golongan (Islam), akan tetapi mereka diam tidak mengadakan tantangan dan perlawanan, karena jiwa toleransi mereka.

Meskipun Prawoto menyatakan kekesalannya kepada PPKI dan Soekarno, ia menunjukkan beberapa fakta, yang agak sedikit menghibur dirinya, katanya, "Jepang ikut berperan dalam penyusunan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sehingga bila dipersentasikan, hanya 12% wakil Islam, suatu persentase yang tidak mencerminkan susunan masyarakat Indonesia."

Maarif memberikan penilaian yang berbeda dengan Prawoto dan Anshary yang pernyataannya terkesan membela Islam. Ia mengatakan: Setiap usaha dari mana pun, yang mencoba memisahkan Pancasila dari intervensi wahyu adalah a-historis, sebab Pancasila yang dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah tidak sama dengan formula Pancasila yang disampaikan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Atribut 'Yang Maha Esa sesudah 'Ketuhanan' dalam sila pertama (dalam Pembukaan serta Batang Tubuh) jelas sekali menunjukkan bahwa konsep Ketuhanan dalam Pancasila bukanlah fenomena sosiologis, melainkan refleksi ajaran tauhid."

Meskipun Maarif juga mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai refleksi ajaran tauhid, ia berpendapat bahwa ticalak berarti bahwa pemeluk agama lain tidak mempunyai kebebasan dalam menafsirkan sila pertama itu menurut agama mereka masing-masing.

Bahtiar Effendy menduga, mengapa para pemimpin kelompok Islam bisa segera menerima penghapusan Piagam Jakarta, *pertama*, dimasukkannya kata-kata "Yang Maha Esa" dapat dilihat sebagai langkah simbolik untuk menunjukkan kehadiran unsur monotheistik Islam dalam ideologi negara. *Kedua*, situasi yang berlangsung menyusul. diproklamasikannya kemerdekaan mengharuskan para pendiri republik ini untuk bersatu menghadapi masalah-masalah lain, misalnya Belanda hendak menduduki kembali nusantara, yang dalam istilah Mr. Kasman Singodimejo, Belanda sedang thingil-thingil dan thongol-thongol. Belanda siap mengintai dan siap menyerbu Indonesia. *Ketiga*, didorong rasa optimisme, karena jumlah konstituen yang besar, para tokoh Islam percaya bahwa lewat pemilihan umum yang akan diselenggarakan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, mereka masih mempunyai kesempatan untuk secara konstitusional menjadikan negara ini berdasar Islam. Untuk argumentasi ini, Ki Bagus Hadikusuma atas dukungan Mr. Kasman Singodimejo lama-kelamaan bersedia menerima usulan-usulan Hatta."

18. Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: Grafiti, 1997, hlm. 153-157, 172-174, 281-283.
19. HM. Fakhri Usman, "Perjuangan Mencapai Konstitusi Islam dalam Konstituante", prasaran sidang Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta, tanggal 24-26 Agustus 1957, hlm. prasaran.
20. *Ibid.* Lihat juga Prasaran dan Putusan Sidang Tanwir 1957, 24-26 Agustus 1957 di Yogyakarta, "Catatan Sidang Tanwir", hlm. 5-6. Dalam sidang Tanwir ini Abdul Kahar Muzakir mendapat amanat menyampaikan prasaran "Tugas Muhammadiyah Terhadap Undang-undang dan Peraturan-petaturan Pemerintah yang Bertentangan dengan Islam". Namun beliau segera ke Bandung untuk urusan "Biro Konstitusi?" partai Masyumi sehingga prasaran tersebut dibacakan oleh HM Farid Ma'ruf, salah seorang anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
21. Fakhri Usman, *loc. cit.*
22. PP Muhammadiyah, Muhammadiyah Tujuh Puluh Tahun" (Naskah yang disampaikan kepada para pejabat Republik Indonesia di seluruh Indonesia pada 7 Dzulkaidah 1400 H/16 September 1980), hal. 1.

23. Hamka, *Muhammadiyah dan Masjumi* (Jakarta: Masyarakat Islam, tanpa tahun), hal. 15. Tentang keseluruhan prasarana Ahmad Dahlan yang disampaikan dalam Kongres Islam di Cirebon pada 1921, lihat Abdul Munir Mulkhan, *Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah* (Yogyakarta Persatuan, 1990), hal. 156-168
24. Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1974), hal. 77.
25. PP Muhammadiyah Majelis Hikmah, "Hubungan Muhammadiyah dengan Masjumi" (Makalah yang disampaikan dalam sidang Majelis Tanwir di Yogyakarta, 1958) hal 1; Hamka, *Muhammadiyah dan Masjumi* hal. 17; Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau*, hal 77.
26. Sekretariat MIAI, *Boekoe Peringatan 1937-1941 MIAI* (Surabaya: Sekretariat MIAI, tanpa tahun), hal. 2. MIAI ini pada zaman Jepang berubah menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia.
27. PP Muhammadiyah Majelis Hikmah, "Hubungan Muhammadiyah dengan Masjumi," hal. 1-2, Hamka, *Muhammadiyah di Minangkabau* hal. 78.
28. Yusuf Abdullah Puar, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah* (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), hal. 297.
29. Syamsuddin, *op. cit*, hal. 178.
30. Abdul Munir Mulkhan, "Perkembangan Muhammadiyah dalam Perubahan Sosial Kemasyarakatan," *Naskah Awal Sejarah Muhammadiyah* (Yogyakarta. PP Muhammadiyah Majelis Pustaka, 1990), hal. 4.
31. Abdullah Puar, *op. cit*, hal. 297; Syamsuddin, *op. cit*, hal. 178.
32. *Ibid*, hal. 298.
33. PP Muhammadiyah, "Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Berdirinya Parmusi" (*Press release* Muhammadiyah, 28 Februari 1968).
34. PP Muhammadiyah, "Pedoman Seluruh Pimpinan dalam Slogar Muhammadiyah Seluruh Indonesia Setelah Parmusi Berdiri" (Makalah yang disampaikan dalam instruksi kepada Pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia, Yogyakarta, 3 Maret 1968).
35. *Ibid*.
36. Baca Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 4.